BAGIAN I
ORASI ILMIAH

Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia

Ahmad Syafii Maarif

Pendahuluan

Dilihat dari rentang waktu, ilmuwan sosial baru tertarik kepada isu politik identitas pada 1970-an, bermula di Amerika Serikat, ketika menghadapi masalah minoritas, jender, feminisme, ras, etnisitas, dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan, merasa teraniaya. Dalam perkembangan selanjutnya cakupan politik identitas ini meluas kepada masalah agama, kepercayaan, dan ikatan-ikatan kultural yang beragam.

Di Indonesia politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing. Gerakan pemekaran daerah dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari politik identitas itu. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral dalam wacana politik mereka, tetapi apakah semuanya sejati atau lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin, merupakan masalah yang tidak selalu mudah dijelaskan.

Pertanyaannya kemudian adalah: apakah politik identitas ini akan membahayakan posisi nasionalisme dan pluralisme Indonesia

di masa depan? Jika berbahaya, kira-kira dalam bentuk apa, dan bagaimana cara mengatasinya? Makalah ini akan mendiskusikannya lebih jauh. Tetapi sebelum pembicaraan menukik kepada permasalahan yang muncul di negeri kita, sebagai bahan perbandingan yang cukup relevan dengan situasi Indonesia, kita juga akan melihat berbagai tipe politik identitas di berbagai tempat dan di kalangan diaspora Muslim di Barat.

Politik Identitas: Kerangka Teori dan Bentuk Praksisnya di berbagai Kawasan

Adalah L.A. Kauffman yang pertama kali menjelaskan hakikat politik identitas dengan melacak asal-muasalnya pada gerakan mahasiswa anti-kekerasan yang dikenal dengan SNCC (the Student Nonviolent Coordinating Committee), sebuah organisasi gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat di awal 1960-an.[1] Siapa sebenarnya yang menciptakan istilah politik identitas itu pertama kali masih kabur sampai hari ini. Tetapi secara substantif, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara. Di sinilah ide tentang keadilan untuk semua menjadi sangat relevan. Di Amerika Serikat, para penggagas teori politik identitas berdalil bahwa praktik pemerasanlah yang membangun kesadaran golongan yang diperas, khususnya masyarakat kulit hitam, masyarakat yang berbahasa Spanyol, dan etnis-etnis lainnya yang merasa terpinggirkan oleh roda kapitalisme yang berpihak kepada pemilik modal yang umumnya dikuasai golongan kulit putih tertentu.

---

[1]Lihat L.A. Kaufffman, "The Anti-Politics of Identity," *Socialist Review*, No.1, Vol. 20 (Jan.-March 1990), hal. 67-80. Analisis yang lebih komprehensif tentang politik identitas ini dapat dibaca dalam karya Amy Gutmann, *Identity in Democracy* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2003), setebal 211 halaman plus catatan akhir dan indeks.

Bentuk ekstrem politik identitas adalah mencuatnya sampai batas-batas tertentu gagasan tentang separatisme. Ini terlihat misalnya di Quebeck, yang berbahasa dan berbudaya Perancis, yang ingin memisahkan diri dari bangsa Kanada yang berbahasa Inggris. Begitu juga terbaca dalam gerakan Islam tipikal Louis Farrakhan (l. 1933) dengan The Nation of Islam-nya di Amerika Serikat, tetapi yang ditolak oleh kelompok hitam Muslim arus besar lainnya. Tetapi pada tahun 2000 politik identitas keagamaan model ini dapat diatasi dengan tercapainya perdamaian antara Farrakhan dengan Wareeth Din Muhammad, mantan saingannya, untuk meredam politik identitas kelompok Muslim Hitam untuk kemudian menyatukan dirinya dengan arus besar bangsa Amerika yang plural.

Dalam pandangan Gutmann, politik identitas, yang juga terlihat pada gerakan Martin Luther King dan uskup-uskup Katolik di Amerika, sesungguhnya lebih didorong oleh argumen keadilan sosial, bukan karena alasan agamanya.[2] Dalam perspektif ini, gerakan Muslim Hitam di Amerika dalam pandangan saya tidak banyak berbeda dengan gerakan etno-relijius lainnya. Sekali lagi, karena mengalami perlakuan yang tidak adil dan ingin berlakunya prinsip persamaan (*equality*) dalam masyarakat luas, gagasan tentang politik identitas telah menjadi topik kajian di kalangan para ilmuwan dengan membingkainya dalam teori-teori sosial yang beragam. Sikap pro dan kontra di kalangan ilmuwan telah semakin merangsang orang untuk mengenal lebih jauh apa hakekat politik identitas itu.

Tetapi yang benar-benar spektakuler dari gelombang politik identitas ini terjadi setelah federasi Uni Soviet berantakan pasca Perang Dingin (1945-1980-an). Bangsa-bangsa yang sebelumnya bergabung (secara paksa) dengan federasi itu, setelah kekuatan pusat merapuh yang memaksa komunisme digiring ke tiang gantungan sejarah, mereka menyatakan dirinya sebagai unit-unit negara merdeka, baik

[2]Lihat Gutmann, *ibid*., hal. 168.

yang ada di sekitar Laut Kaspia atau pun yang berada di Asia Tengah. Kehancuran Uni Soviet sebelumnya juga dipicu oleh gerakan mujahidin di Afghanistan yang didukung oleh Amerika Serikat dalam upaya menghentikan pendudukan pasukan Soviet di negeri miskin itu.[3] Tentu bagi Amerika dukungan itu untuk memenangkan Perang Dingin, bukan untuk kepentingan rakyat Afghanistan. Munculnya Mikhail Gorbachev (l.1931) kemudian dengan gerakan *glasnost* dan *perestroika*-nya telah memberikan pukulan terakhir untuk mempercepat keruntuhan federasi tirai besi itu yang sudah berusia sekitar 70-an tahun. Dominasi etnis Rusia atas etnis-etnis yang lain dalam federasi Uni Soviet telah lama memicu semacam api dalam sekam untuk kemudian membakar bangunan federasi itu.

Dengan kata lain, secara diam-diam bangsa-bangsa yang tergabung dalam federasi Uni Soviet itu sebenarnya sudah cukup lama ingin melepaskan diri sebagai realisasi dari politik identitasnya masing-masing, tetapi tembok komunisme saat itu terlalu kuat untuk ditembus. Baru setelah tembok itu kropos, maka bangsa-bangsa yang telah lama merasa tertindas itu, beramai-ramai melepaskan diri. Peristiwa ini merupakan salah satu kejadian sejarah terbesar yang menghebohkan di akhir abad ke-20, sebagai ujung Perang Dingin, di samping PD (Perang Dunia) I dan PD II yang telah menelan puluhan juta korban manusia dan kerusakan menyeluruh. Tetapi pada setiap perubahan dahsyat yang berlaku pada tataran global, pasti ada saja sisi positifnya. Bukankah kemerdekaan bangsa-bangsa baru di Asia dan Afrika umumnya terjadi pasca PD II, sebagai bagian dari kekuatan nasionalisme berhadapan dengan kolonialisme dan imperialisme global yang juga sudah merapuh. Sekiranya PD II tidak meledak, boleh jadi kemerdekaan Indonesia, misalnya, bakal tertunda, entah untuk berapa lama.

---

[3]Tentang masalah Perang Dingin ini, ikuti Resonansi saya, "Perang Dingin, Afghanistan, dan Terorisme," *Republika*, 7, 15, dan 29 September 2009, hal. 4.

Selain itu kita juga melihat relasi penggunaan bom atom oleh Amerika di akhir PD II dan proses percepatan deklarasi kemerdekaan Indonesia, seperti pernah saya sampaikan dalam kesempatan lain dan saya nukilkan di bawah ini:

> PD II telah mengubah peta dunia secara dramatis. Apa yang diperkirakan Bung Hatta dan Bung Karno tentang Perang Pasifik telah menjadi kenyataan. Sekalipun pergerakan nasional mengalami kelesuan yang parah pada 1930-an, semangat dan api untuk merdeka tidak pernah redup dan susut. Perang Pasifik sebagai bagian dari PD II berakhir bulan Agustus 1945... Sebenarnya daya tahan Jepang untuk melanjutkan peperangan sudah melemah. Maka sekiranya Amerika Serikat tidak menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus dan Nagasaki tiga hari kemudian, kekalahan Jepang sudah diambang pintu. Ada persoalan moral yang sangat serius di sini, ... kontroversi tentang perlu tidaknya pengeboman itu masih saja berlanjut sampai sekarang. Banyak pengamat militer menilai bahwa pengeboman itu tidak perlu, termasuk Jenderal Dwight David Eisenhower (1890-1969) yang secara tidak langsung mengeritik pendahulunya Truman yang juga bekas atasannya yang mempromosikannya untuk memimpin NATO (North Atlantic Treaty Organization). Eisenhower adalah presiden ke-34 Amerika Serikat, 1953-1961...
>
> Tetapi rupanya Truman dan para pendukungnya telah berketetapan hati untuk memukul Jepang dengan cara menggunakan senjata maut itu. Suara Eisenhower tidak didengar ketika itu.
>
> Penggunaan bom atom dengan tujuan memukul lawan dalam peperangan tidak dapat dilepaskan dari peran ilmuwan, seperti terbaca dalam surat Albert Einstein tertanggal 2 Agustus 1939 kepada Presiden Franklin D. Roosevelt. Di bagian akhir suratnya, Einstein mengisyaratkan bahwa Jerman di bawah Hitler sedang menyiapkan pembuatan bom atom. Surat ini jelas telah mendorong Roosevelt (wafat pada 12 April 1945 kemudian digantikan Truman) untuk mengembangkan sendiri pembuatan bom yang mematikan itu. Dalam konteks inilah kita harus membaca asal-usul drama Hiroshima-Nagasaki di akhir PD II itu.
>
> PD II (1939-1945) semula lahir dari rahim peradaban Barat modern, dipicu oleh ambisi Hitler, diktator Jerman, yang ingin menguasai seluruh Eropa. Jerman yang merasa terhina oleh Perjanjian Versailles 1919 sebagai ekor PD I hanyalah menunggu waktu untuk balas dendam. Sebuah bangsa yang begitu banyak melahirkan ilmuwan dan filsuf dalam situasi yang tidak stablil dan menanggung beban malu, Jerman ternyata bisa jatuh ke tangan Hitler yang haus darah, haus tanah. Yang sulit dipahami adalah sikap yang

> diambil filsuf Martin Heidegger pada tahun 1930-an yang memuji Hitler dengan kalimat ini: *"The Führer [pemimpin, Hitler] himself and he alone is the German reality, present and future, and its law."* Baru kemudian pasca PD II, ketika Hitler sudah tiada, Heidegger menyifatkan Hitlerisme sebagai "ledakan sejarah dari penyakit struktural di kalangan umat manusia secara keseluruhan dan menyatakan keprihatinannya bahwa itu akan memakan waktu untuk bisa bebas dari racun itu."[4]

Apa yang dibicarakan di atas, lebih terkait dengan konstelasi politik di Eropa dan Amerika.

Di kawasan timur, Jepang pada tahun-tahun awal PD II berada di atas angin, seperti halnya Jerman di Eropa, tetapi dengan bergulirnya waktu energi dan pelurunya habis, dan bom atom telah mengakhiri segala-galanya secara dramatis. Dalam kaitan inilah kita melihat secara tidak langsung "berkah" bom atom dengan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ada semacam misteri angka 17 dalam proses kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus adalah hari proklamasi, tetapi 17 tahun sebelum itu pada bulan yang berbeda terjadi Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ini perlu saya singgung karena dalam pembicaraan tentang politik identitas dan fakta tentang pluralisme di Indonesia menduduki posisi yang cukup penting, sebagaimana yang akan dibicarakan pada bagian akhir makalah ini.

Dalam kaitannya dengan gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa pasca PD II, termasuk Indonesia, politik identitas haruslah dinilai sebagai sesuatu yang positif dan bahkan sebagai keharusan sejarah, sebagaimana yang dikukuhkan dalam Pembukaan UUD 1945 tentang kemerdekaan bangsa-bangsa, yang berbunyi: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."[5]

---

[4]Lihat Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah* (Bandung dan Jakarta: Mizan-Maarif Institute, 2009), hal. 125-127.

[5]Lihat alinea pertama Pembukaan UUD 1945.

Sebelum memasuki ranah ini, sebagai ilustrasi, saya ingin memberikan gambaran tentang berbagai corak politik identitas yang terlihat di kalangan diaspora Muslim di belahan dunia Barat, sesuatu yang sebenarnya agak mencemaskan dalam cara mereka merumuskan identitas kolektif mereka di "tanah air baru", tempat mereka mencari rezeki.

Di negeri asal mereka, kaum Muslim ini mungkin telah terpinggirkan oleh berbagai rintangan politik, ekonomi, dan kultural, sementara di Eropa mereka sukar sekali menyesuaikan diri, kecuali mereka yang punya padangan kemanusiaan yang luas, berkat pendidikan yang mereka terima di negara yang mereka datangi. Keterikatan primordial yang masih kuat di antara para pendatang baru ini dengan akar kulturalnya masing-masing menjadi salah satu sebab mengapa kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru sering menghadapi berbagai rintangan, dari kadar yang ringan sampai kepada kadar yang sangat serius. Pelaku bom bunuh diri di beberapa kota di Eropa adalah contoh gamblang tentang ketidakmampuan beradaptasi ini, sekalipun faktor-faktor ekternal, seperti masalah Palestina, Kashmir, kemudian masalah Afghanistan dan Irak, telah menambah kusutnya situasi psikologis para perantau Muslim yang sedang oleng dan bingung ini. Dalil-dalil agama yang digunakan telah semakin memantapkan perasaan mereka untuk segera mengakhiri kehidupan, tetapi biadabnya juga dengan membunuh orang lain yang tidak bersalah.

Politik Identitas dengan Jubah Islam

Pada saat dunia Islam yang terpecah sedang berada di buritan peradaban sejak beberapa abad yang lalu, dalam pandangan saya akan sangat sulit menemukan pribadi-pribadi Muslim yang mampu secara psiko-religio-kultural bersikap lebih tenang, objektif, dan realistik, kecuali mereka yang terdidik dan tercerahkan. Fenomena ini terutama terlihat di kalangan mereka yang merantau ke negara-negara Barat yang jumlah mereka semakin membengkak dari tahun

ke tahun. Di negara-negara Uni Eropa saja misalnya, sejak beberapa tahun terakhir, jumlah Muslim sudah mencapai 20 juta,[6] sebuah jumlah yang cukup besar. Di Amerika penduduk Muslimnya bergerak antara 6-8 juta,[7] baik yang berasal dari imigran maupun melalui konversi. Sekarang orang sudah mulai berbicara tentang *Islam in the West*, sebagai imbangan dari steriotipe *Islam and the West* sebagai kelanjutan dari konsep klasik *Dâr al-Islâm* dan *Dâr al-Harb*, yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dunia mutakhir. Di antara Muslim perantau di belahan bumi Barat itu, masih ada saja yang terpasung oleh konsep klasik Islam itu. Akibatnya perasaan keterasingan sering menghantui mereka di tanah air baru itu. Akan pulang kampung, situasi politik-ekonomi juga tidak memberi harapan, selain harus berhadapan dengan rezim-rezim despotik yang korup yang tidak jarang mendapat pembenaran agama dari ulama yang tak paham peta. Munculnya kelompok garis keras Muslim umumnya berasal dari mereka yang merasa terasing ini. Ini adalah di antara tragedi diaspora Muslim di awal abad ke-21 yang tidak jarang menggunakan jubah Islam sebagai politik identitasnya.

Tetapi mereka yang percaya bahwa Amerika, misalnya, dapat saja menjadi bumi Islam, sekalipun jumlahnya minoritas, akan bersikap lebih longgar dalam menafsirkan ajaran Islam untuk mencari jawab tentang makna keberadaan mereka di sana.[8] Kelompok ini umumnya terdiri dari mereka yang terdidik dengan berbagai profesi yang mampu bertanding dengan penduduk asli. Mereka ini tidak perlu ribut dengan masalah politik identitas dengan memakai label Islam, karena mereka sudah merasa menjadi bagian dari *mainstream*

---

[6]Lihat Bassam Tibi, *Political Islam, World Politics and Europe: Democratic Peace and Euro-Islam versus Global Jihad* (New York: Routledge, 2008), hal. 13.

[7]Lihat Murad W. Hoffman, *Bangkitnya Agama: Ber-Islam di Amerika Baru*, terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi, 2003), hal. 261.

[8]Lihat Jane I. Smith, *Islam in America* (New York: Columbia University Press, 1999), hal. 178.

masyarakat luas dengan segala kemampuan saringan kultural yang mereka miliki. Pengangkatan Dr. Ahmad Zewali (kelahiran 26 Februari 1946, asal Mesir), pakar kimia kaliber dunia, dan pemenang Hadiah Nobel 1999, menjadi salah seorang penasehat kepresidenan Obama di bidang sains dan teknologi April 2009 adalah di antara contoh tentang mobilitas sosial Muslim di Amerika.[9]

Gejala serupa ini tidak saja terdapat di Amerika, tetapi juga di bagian-bagian dunia Barat lainnya. Barangkali lantaran munculnya generasi baru Muslim yang cerah ini, Murad W. Hoffman begitu optimis menatap masa depan Islam di Barat dengan mengatakan: *"I think the Muslims in America and in Europe will the leaders for the intellectual rivitalization of the Muslims in the East."*[10] Untuk jangka panjang, optimisme Hoffman tidaklah terlalu mengada-ada, khususnya untuk Amerika, karena: *"In America, Muslims came as students from the entire Muslim world and they all went to become doctors, engineers, lawyers… with the result that the Muslim population in America has the highest ratio of academically trained people in America, more the Jews."*[11] Sebaliknya di Eropa, *"the Muslims in Europe all came as workers, unskilled workers and therefore, socially, they started from the bottom and this you can still notice."*[12]

Memang selama beberapa tahun terakhir, akibat tragedi 9/11-2001, Muslim di Amerika sempat menjadi goncang dan cemas, karena mereka diteror sebagai orang yang dipandang memusuhi Barat. Tetapi secara berangsur, keadaan sudah semakin menjadi normal karena dua hal: *Pertama*, berkat penjelasan yang diberikan tokoh-tokoh Muslim kepada publik Amerika bahwa Islam secara keras

---

[9]Lihat *Republika, "*Kiprah Ilmuwan Muslim di Gedung Putih," 28 September 2009, hal. 12.

[10]"Murad W. Hofmann on Islamic Renaissance in the West," wawancara dengan Hossam Tammam. Lihat http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1162385875683&pagename=Zone-English-Euro_Muslims%2FEMELayout., diunduh pada 5 Oktober 2009.

[11]*Ibid.,* hal. 6.

[12] *Ibid.*

mengutuk terorisme; *kedua*, harus dicatat jasa dua penulis non-Muslim: John L. Esposito (Amerika) dan Karen Armstrong (Inggris) yang tidak bosan-bosannya menjelaskan bahwa Islam itu dari sisi ajarannya adalah agama damai, bukan agama teror. Perbuatan segelintir orang yang sedang mabuk tidak dapat dijadikan alasan untuk mengategorikan bahwa Islam itu adalah agama pro-kekerasan. Tetapi di kalangan neokonservatif Amerika dan Zionis, kedua penulis Barat ini malah dituduh telah melakukan apologi terhadap Islam.

Karen Armstrong menyebut dua nama yang menuduh dirinya dan Esposito sebagai apolog itu. Mereka adalah Martin Kramer, kepala Institut Studi Timur Dekat dan Timur Tengah di Washington D.C. dan Bernard Lewis, sejarawan Inggris yang banyak menulis tentang Islam dan Arab. Menurut Armstrong, dua nama ini adalah *"staunch Zionists"* yang menulis tentang Islam dan Muslim dari posisi yang sangat bias.[13] Tetapi, kata Armstrong, "orang perlu tahu bahwa Islam adalah sebuah agama universal, dan di situ tidak ada sesuatu yang bersifat oriental secara agresif atau bersifat anti-Barat. Sebaliknya, dalam garis Lewis, Islam secara inheren adalah sebuah agama pro-kekerasan (*violent religion*).[14] Bias Zionis ini semakin meyakinkan Armstrong, saat ia berkunjung ke Israel pertengahan tahun 1980-an sebagai petugas

---

[13]Lihat wawancara Karen Armstrong dengan judul "Islam and the West" dengan Omayma Abdel-Latif dalam http://www.campus-watch.org/article/id/3097, March 8, 2007, hal. 2-3, diunduh pada 5 Oktober 2009.

[14]*Ibid.,* hal. 3. Keingintahuan Barat terhadap Islam dibuktikan antara lain oleh kenyataan laris manisnya buka karya Armstrong, *Muhammad: a Biography of the Prophet*, yang sejak pertama kali muncul tahun 1996 telah terjual jutaan eksemplar (hal. 4). Sedangkan karyanya yang lain *Understanding Islam*, pada tahun 2007, di Pantai Timur Amerika saja telah terjual sebanyak lebih dari 250.000 eksemplar. Para pembeli buku ini, kata Armstrong, pertama, ingin mengukuhkan prasangka buruk dan rasa takutnya terhadap Islam yang sudah berlangsung selama berabad-abad; kedua, sebagian besar karena memang ingin tahu tentang Islam (hal. 1-2). "Sesuatu yang baik pada rakyat Amerika," kata Armstrong, ialah "mereka benar-benar ingin tahu." Suasana serupa jarang dijumpai di Eropa, seperti terlihat di Belanda, misalnya, karena mereka berasumsi bahwa mereka telah paham semua (hal. 2). Ada semacam keangkuhan pengetahuan di sini.

Channel Four televisi Inggris, lalu ia menyadari benar bahwa di sana "sedang berlaku sesuatu yang sangat tidak benar", karena sikap rasis terhadap orang Arab mendominasi masyarakat Israel.[15] Jika 30 atau 40 tahun yang lalu, di Eropa terdengar ungkapan *"dirty Jews,"* mengapa kemudian di kalangan Zionis diciptakan pula istilah *"dirty Arabs"*?[16] Ada lagi pernyataan Armstrong yang cukup menyentak: "Dunia Muslim tidak berbuat apa-apa terhadap orang-orang Yahudi, dan rakyat Palestina sedang membayar harga dosa-dosa Eropa,"[17] karena perlakuan brutal Nazi Hitler atas orang-orang Yahudi di benua itu selama PD II.

Sengaja saya kutip pendapat Armstrong agak panjang dengan pertimbangan bahwa selama masalah Palestina tak kunjung selesai, maka politik identitas dengan jubah agama bisa saja akan semakin mengeras di kalangan sebagian diaspora Muslim di Barat yang merasa tetap punya dasar berpijak untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan secara membabi buta dan biadab, seperti biadabnya perlakuan Israel terhadap rakyat Palestina. Dengan kata lain, yang terjadi adalah benturan keras antara dua kutub politik identitas: Arab-Islam vs. Zionisme yang sudah berlangsung sejak 1948 dengan korban nyawa ratusan ribu di samping harta benda yang tak terhitung, terutama di kalangan rakyat Palestina.

Untuk mengakhiri bagian ini, pandangan Bassam Tibi tentang politik identitas diaspora Muslim di Eropa akan semakin menjelaskan analisis kita hari ini. Isu ini menjadi penting terutama karena pembengkakan demografis Muslim ini di benua itu seperti sudah tidak dapat lagi dibendung, sehingga seorang Bernard Lewis sampai mencemaskan bahwa di akhir abad ke-21, *"Europe will become a part of the Arab-Muslim Maghreb … ,"*[18] sebuah kecemasan yang mungkin agak berlebihan. Tetapi melihat angka-angka di bawah ini, jika semuanya berjalan normal dan benturan keras antara peradaban tidak

---

[15]*Ibid.*

[16]*Ibid.*

[17]*Ibid.*

[18]Dikutip dari Tibi, *op.cit.,* hal. 202.

terjadi, maka pertambahan jumlah dispora Muslim itu memang agak mengejutkan. Tahun 2000 jumlahnya baru 15 juta, enam tahun kemudian menjadi 20 juta, dan pada tahun 2035 diproyeksikan akan berubah menjadi 40 juta,[19] yang tersebar di seluruh Eropa, sekalipun yang terbanyak berada di Perancis dan Inggris. Coba bandingkan situasi tahun 1950, umat Islam di Eropa kurang dari satu juta, baru sejak 1960-an ketika ekonomi benua itu mengalami kemajuan pesat, maka berdatanganlah para imigran dari berbagai negeri Muslim untuk perbaikan nasib mereka.[20]

Jika masalahnya semata bersifat demografis dalam upaya mengadu nasib, mungkin hal itu tidak akan terlalu merisaukan. Tetapi para diaspora ini, terutama dengan ideologi Islamis dan Salafis, sekalipun minoritas, berhasil memengaruhi sebagian besar masjid di Eropa. Melalui media masjid inilah pesan-pesan politik mereka dengan dalil-dalil sakral disampaikan dengan efektif. Di sinilah pembicaraan tentang politik identitas menjadi sangat krusial untuk dikaji sebagai bahan penting bagi pembacaan peta politik Indonesia kontemporer.

Menurut Tibi, ada dua kemugkinan yang akan berlaku dalam hubungan Eropa dan Islam. *Pertama,* proses pengeropaan Islam (*the Europeanization of Islam*); *kedua,* proses pengislaman Eropa (*the Islamization of Europe*). Tibi memilih yang pertama, karena ini yang paling masuk akal dan realistik, sedangkan kelompok politik identitas Islam memperjuangkan opsi yang kedua,[21] sebagai kelanjutan dari gagasan *dâr al-islâm* periode klasik yang sudah sangat lapuk, tetapi doktrin ini masih saja mempengaruhi prilaku sebagian orang Islam masa sekarang. Sikap a-historis ini ikut bertanggungjawab mengapa sebagian orang Islam masih saja berada di alam mimpi, sehingga tidak mau hirau terhadap perubahan sosial yang sedang berlaku.

Dalam pendangan saya, jika opsi kedua ini yang terus dipegang, maka bentrokan berdarah tidak mungkin dapat dihindari, sebab pada

[19]*Ibid.*
[20]*Ibid.,* hal. 203.
[21]*Ibid.,* hal. 194-198.

dasarnya psikologi orang Eropa pada umumnya masih belum rela menerima kehadiran Islam di kalangan mereka, apalagi dalam bentuk *en mass*. Ingatan kolektif mereka tentang berbagai peristiwa masa lampau, seperti kekalahan pasukan Islam di Poiters tahun 732 masehi, Perang Salib selama beberapa abad, dan penaklukkan Konstantinopel oleh Turki Usmani tahun 1453 masih segar. Apalagi dengan Tragedi 11/9, bom Madrid 2004, dan bom London 2005, trauma masa lalu itu malah menjadi kambuh dan mengeras lagi. Tetapi sebagian para perantau ini, tidak peduli akan realitas sejarah yang sudah berubah dengan sangat dahsyat. Pokoknya Eropa harus diislamkan melalui berbagai cara. Bukankah Islam itu agama da'wah, seperti halnya agama Kristen? Kaum fundamentalis Kristen dan Islam punya filosofi serupa dalam hal absolutisme ajaran yang harus diterima pihak lain. Ruang untuk toleransi dan perbedaan pendapat dinilai sebagai suatu kelemahan dan tidak percaya diri. Demi absolutisme, maka diktum *"either with us, or, against us"* menjadi pegangan mereka dalam bersikap. Presiden George W. Bush termasuk dalam kategori yang berpaham serba absolut ini. Dialah presiden Amerika pertama yang membawa suasana agama Kristen fundamentalis yang kental ke Gedung Putih, seperti yang dicatat pada tahun 2005 oleh sejarawan Amerika Arthur M. Schlesinger (1917-2007) sebagai berikut: *"George W. Bush is the most aggressively religious president Americans have ever had."*[22]

Sebuah ironi bagi politik identitas Muslim di Eropa adalah bahwa para pendukungnya datang ke Eropa untuk memperbaiki keadaan ekonominya, tetapi nilai-nilai Eropa seperti demokrasi, pluralisme, hak-hak asasi manusia, mereka tolak. Tibi melihat bahwa: *"European-ization of Islam is the antithesis to the Islamization of Europe."*[23] Sebagai seorang yang sudah hidup di Jerman selama lebih 40 tahun, pilihan

---

[22]Arthur M. Schlesinger, "Forgetting Reinhold Niebuhr," *Sunday Book Review New York Times*, 18 Sept. 2005, http://www.nytimes.com/2005/09/18/books/review/18schlesinger.html?_r=1, diunduh pada 5 Oktober 2009.

[23]*Ibid.*, 194-195.

Tibi di atas bukan mengada-ada, tetapi tokoh-tokoh diaspora Muslim lainnya tidak bisa memahami. Dengan semangat da'wah yang tinggi, kelompok ini tetap saja berambisi untuk "mengislamkan Eropa," sebuah ambisi jihad Islam yang mereka bawa dari kampung halamannya masing-masing yang anti-pluralisme dan nilai-nilai demokrasi. Di bagian akhir karya tulisnya, Tibi mengemukakan resep berikut bagi kepentingan masa depan hubungan Islam dan Eropa:

> Dalam mengaitkan penalaran umum ini bagi Islam dan Eropa, saya berargumen tentang perlunya sebuah pendidikan baru berdasarkan demokratisasi dan nilai-nilai terkaitnya di kalangan diaspora Islam Eropa. Jika Muslim yang tinggal di Eropa mau berperan dalam upaya ini, mereka perlu memikirkan kembali Islam (*to rethink Islam*), mengakomodasikannya terhadap kondisi-kondisi yang telah berubah dan memisahkan dirinya dari ideologi politik Islamisme, dan juga dari gerakan yang mewakilinya. Singkat kata, Islam itu selaras dengan demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan masyarakat sipil, jika Muslim memang menginginkannya. Islam selalu menjadi apa yang diperbuat Muslim terhadapnya... Muslim yang terlibat dalam politik identitas yang layak dipertanyakan itu, dan tidak dalam demokratisasi di dunia Islam dan diasporanya di Eropa, pasti berbahaya, baik bagi Islam dan bagi Muslim.[24]

Dalam tesis Murad Hoffman, sikap anti-pluralisme bukanlah cara berislam yang sehat, bahkan merupakan suatu kemunduran. Melalui ungkapan yang tak kurang tajam dan pedasnya, Hoffman yang ingin menggalakkan dinamika intelektualisme dalam masyarakat Islam yang dirasa sangat lamban, menulis: *"Intellectualism means Pluralism. Lack of Pluralism means decadence."*[25] Tetapi untuk sampai kepada pandangan maju dan revolusioner ini, umat Islam secara global harus mau mengeritik diri dengan meluaskan radius pergaulan dengan

---

[24]*Ibid.,* hal. 234.

[25]Diambil dari internet: Murad Hoffman on "The Challenge to Islamic Civilization," kuliah Hoffman di depan forum *Institute of Policy Studies*, Pakistan, 2001, hal. 1.

berbagai kultur dan golongan, di samping membaca literatur sebanyak-banyaknya pula, dari mana pun asal dan sumbernya. Tanpa kesediaan berinteraksi dan berbagi pengalaman (*ta'âruf*) dengan pihak lain, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk memahami apa makna proses pencerahan bagi masa depan Islam dan umatnya yang sudah lama menfosil dalam arus pemikiran kreatif.

Dengan mengemukakan paparan di atas tidak berarti saya ingin menyerahkan batang leher Islam kepada peradaban Barat *in toto*. Unsur peradaban Barat yang busuk juga tidak kurang, seperti arogansi rasial, imperialisme, materialisme, dan sederet sifat lainnya yang merupakan bagian dari daki peradaban yang masih dipelihara. Sikap selektif kritikal harus dimiliki, sebab jika tidak demikian, Islam akan kehabisan peluru profetik untuk ditawarkan sebagai peradaban alternatif bagi manusia modern yang sudah lama hidup dalam suasana "gagasan besar tentang Tuhan yang tertindas," untuk mengutip ungkapan seorang penulis Perancis.[26] Atau ungkapan religio-filosofis dengan muatan yang sama yang berasal dari Václav Havel, mantan Presiden Ceko, seorang pengeritik peradaban Barat modern, dalam kalimat: *"... modern man has lost his transcendental anchor."*[27] Tetapi nilai-nilai demokrasi, pluralisme, hak-hak asasi manusia, toleransi, prinsip kesetaraan gender, dan bangunan masyarakat sipil, sesungguhnya dari sisi ajaran autentik Islam, tidak ada yang aneh. Keanehan muncul karena Islam yang berkembang pasca Perang Siffin (657 masehi) adalah Islam imperial yang tidak ramah terhadap hak-hak sipil dan keadaban. Oleh sebab itu tawaran Tibi, *"to rethink Islam,"* menjadi sangat mutlak, jika umat Islam memang tidak mau terlalu lama hidup dalam kegelisahan dan kebanggaan semu yang melelahkan.

---

[26]Lihat Michael D. Aeschliman, "The Real Nietzsche" dalam *The World & I*, 1990, hal. 846.

[27]Diambil dari internet dalam artikel Walter H. Capp, "Interpreting Válav Havel."

Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme di Indonesia

Setelah kita menyoroti tipe-tipe politik identitas di negara-negara lain, tibalah saatnya kita turun ke Nusantara untuk mencoba meneropong isu serupa berdasarkan pengalaman sejarah dalam rentang waktu 100 tahun terakhir. Dengan uraian ini, nanti saya ingin mengukuhkan posisi intelektual Profesor Nurcholish Madjid dalam kaitannya dengan gagasan besarnya tentang Pancasila yang mungkin dapat diangkat menjadi *kalimatun sawâ'*[28] (prinsip/pegangan/proposisi dasar bersama) bagi Indonesia, dulu, sekarang, dan di masa depan. Dengan Pancasila yang dipahami dan dilaksanakan secara jujur dan bertanggungjawab, semua kecenderungan politik identitas negatif-destruktif yang dapat meruntuhkan bangunan bangsa dan negara ini pasti dapat dicegah. Pluralisme etnis, bahasa lokal, agama, dan latar belakang sejarah, kita jadikan sebagai mozaik kultural yang sangat kaya, demi terciptanya sebuah taman sari Indonesia yang memberi keamanan dan kenyamanan bagi siapa saja yang menghirup udara di Nusantara ini.

Secara historis, pembentukan Indonesia sebagai bangsa baru terjadi tahun 1920-an, dilakukan melalui kegiatan intensif PI (Perhimpunan Indonesia) di Negeri Belanda, kemudian dikukuhkan oleh Sumpah Pemuda 1928. Semua peristiwa penting ini terjadi di zaman kolonial periode akhir. Selanjutnya dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, sebuah negara baru yang juga bernama Indonesia, muncul ke atas peta dunia, sekalipun Belanda dibantu Inggris sama sekali tidak rela dengan cetusan kemerdekaan rakyat terjajah ini.

[28]Proposisi ini berasal dari al-Qur'an s. Âli 'Imrân (3): 64 yang makna lengkapnya adalah sebagai berikut: "Wahai Ahli Kitab, marilah menuju kepada dasar pegangan bersama antara kami dan kamu, yaitu agar kita tidak menyembah selain kepada Allah, dan kita tidak menyekutukanNya dengan sesuatu pun, dan kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah [kepada mereka]: Saksikanlah, bahwa sesungguhnya kami [ini] adalah orang-orang Muslim (berserah diri)."

Seperti sudah disinggung di atas bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa saja tertunda sekiranya PD II tidak meledak, sebab Belanda sebagai penjajah memang tidak pernah siap untuk melihat sebuah kemerdekaan bagi Nusantara yang sebagaian wilayahnya sudah cukup lama dikuasainya.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terluas di muka bumi. Jumlah pulaunya lebih dari 17.000, etnisitas, sub-kultur, dan bahasa lokalnya ratusan. Bahkan di Papua saja misalnya, tidak kurang dari 252 suku dengan bahasa khasnya masing-masing. Dari sisi keragaman budaya (pluralisme) ini saja, jika Indonesia bisa bertahan dalam tempo lama, maka menurut saya adalah mukjizat sejarah yang bernilai sangat tinggi. Oleh sebab itu, apa yang bernama politik identitas yang sering muncul ke permukaan sejarah modern Indonesia harus ditangani dan dikawal secara bijak oleh nalar historis yang dipahami secara benar dan cerdas. Saat proklamasi, jumlah penduduk Indonesia adalah sekitar 70 juta; sekarang di awal abad ke-21 sudah menjadi sekitar 235 juta, membengkak lebih tiga kali lipat sejak 1945, telah muncul sebagai bangsa terbesar keempat di dunia sesudah Cina, India, dan Amerika Serikat.

Modal dasar untuk pengawalan keutuhan bangsa itu sudah kita miliki, yaitu, pengalaman sejarah berupa pergerakan nasional, PI, Sumpah Pemuda, Pancasila, dan adanya tekat bulat untuk mempertahankan dan membela keutuhan bangsa dan negara ini. Dalam ranah gerakan sosial keagamaan, ada Muhammadiyah dan NU, dua sayap besar umat Islam, yang telah mengukuhkan dirinya sebagai benteng demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Sekalipun sering digerogoti oleh kelakuan politisi salah tingkah dalam berbagai periode sejarah pasca proklamasi, *toh* sudah lebih enam dasawarsa, Indonesia masih bertahan dengan segala keberuntungan dan malapetaka yang dialaminya. Tantangan lain yang cukup serius terhadap keutuhan bangsa datang dari berbagai gerakan sempalan agama dengan politik indentitasnya masing-masing. Mereka ini semua anti-Pancasila, anti-demokrasi, dan anti-pluralisme. Bentuk ekstrem dari gerak-

an sempalan ini yang sering melakukan bom bunuh diri di Indonesia punya akar transnasional pada al-Qaedah dengan tokoh utamanya Osama bin Laden (Saudi) dan Ayman al-Zawahiri (Mesir).[29] Indonesia sangat terganggu oleh prilaku nekat bom bunuh diri ini. Peran Densus 88 yang pada akhirnya bisa menghabisi beberapa tokoh puncak bom bunuh diri ini, seperti Dr. Azahari dan Noordin M. Top (keduanya warga Malaysia), dan beberapa pengikutnya warga Indonesia, patut diberi apresiasi yang tinggi.

Di atas sudah dikatakan bahwa politik identitas di Indonesia lebih bermuatan etnisitas, agama, dan ideologi politik. RMS (Republik Maluku Selatan), GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dan GPM (Gerakan Papua Merdeka), sebagai misal, adalah perwujudan dari kegelisahan etnis-etnis ini terhadap politik sentralistik Jakarta yang dirasa sangat tidak adil, khususnya bagi Aceh dan Papua. Gerakan DI (Darul Islam) di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan, menggunakan agama sebagai payung ideologi politik identitas mereka. Kecuali GPM yang masih seperti api dalam sekam sampai hari ini, gerakan-gerakan politik identitas lain seperti tersebut di atas, relatif telah dapat diatasi melalui kekerasan senjata atau diplomasi persuasif.

Selain itu, masih di era pasca-proklamasi, Indonesia juga pernah diancam oleh Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, Pemberontakan PRRI/Permesta di akhir 1950-an dan awal 1960-an. PKI menggunakan ideologi Marxisme sebagai politik identitasnya, sedangkan PRRI/Permesta lebih merupakan gerakan protes terhadap politik Presiden Sukarno yang dinilai telah melanggar UUD 1950 dan sikap pro-PKI yang dirasakan pada periode itu. Untuk Pemberontakan G30S 1965, politik identitas apa yang memicunya, masih kontroversial sampai hari ini. Pemerintahan Soeharto, yang didukung oleh pendapat beberapa penulis domestik dan asing, mengatakan bahwa PKI-lah

[29]Tentang siapa Osama bin Laden dan al-Zawahiri, lihat misalnya Fareed Zakaria, *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad* (New York and London: W.W. Norton & Company, 2003), hal. 125 dan 136.

sebagai otak utama tragedi itu. Penulis-penulis kiri berpendapat sebaliknya. Jika pun ada unsur PKI terlibat, partai ini hanyalah terseret arus oleh persaingan dalam tubuh AD (Angkatan Darat). Sedangkan di mana posisi Presiden Sukarno dalam tragedi itu, masih perlu dikaji lebih jauh. Karena masalah ini sudah banyak dikupas oleh berbagai kalangan, sekalipun belum juga tuntas, saya tidak ingin untuk saat ini berbicara banyak tentang peristiwa berdarah yang terjadi di kalangan sesama anak bangsa ini.

Sekarang saya beralih kepada realitas politik Indonesia kontemporer. Yang menjadi *burning issues* dalam kaitannya dengan masalah politik identitas sejak 11 tahun terakhir ialah munculnya gerakan-gerakan radikal atau setengah radikal yang berbaju Islam di Indonesia. Sebagaimana partner mereka di bagian dunia lain, gerakan-gerakan ini juga anti-demokrasi dan anti-pluralisme, dan sampai batas-batas yang jauh juga anti-nasionalisme. Secara ideologis, mereka ini jelas mendapat inspirasi dan pengaruh dari gerakan Islamis dan Salafi yang semula berpusat di beberapa negara-negara Arab, kemudian dengan kecepatan tinggi menyebar ke seluruh jagat. Untungnya di Indonesia, sebagian besar masjid masih di bawah pengawalan Muhammadiyah dan NU, sekalipun ada beberapa yang terinfiltrasi oleh virus ideologi serba radikal itu.

Sekalipun gerakan Islamis dan Salafi ini terdiri dari berbagai faksi di Indonesia, dalam satu hal mereka punya tuntutan yang sama: pelaksanaan Syari'ah Islam dalam kehidupan bernegara. Faksi-faksi yang ingin kita bicarakan di sini ialah MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), FPI (Fron Pembela Islam), dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Sedangkan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang sesungguhnya adalah partai Islamis yang sangat dipengaruhi oleh cita-cita al-Ikhwân al-Muslimûn (Persaudaraan Muslim), bentukan Hassan al-Banna tahun 1928 di Mesir, menempuh jalan demokrasi untuk mencapai tujuannya. Apakah cara-cara demokrasi itu sebagai taktik PKS sebelum menjadi kekuatan politik besar atau memang telah menerima demokrasi sebagai sebuah sistem politik, belum dapat dikatakan se-

sebagai otak utama tragedi itu. Penulis-penulis kiri berpendapat sebaliknya. Jika pun ada unsur PKI terlibat, partai ini hanyalah terseret arus oleh persaingan dalam tubuh AD (Angkatan Darat). Sedangkan di mana posisi Presiden Sukarno dalam tragedi itu, masih perlu dikaji lebih jauh. Karena masalah ini sudah banyak dikupas oleh berbagai kalangan, sekalipun belum juga tuntas, saya tidak ingin untuk saat ini berbicara banyak tentang peristiwa berdarah yang terjadi di kalangan sesama anak bangsa ini.

Sekarang saya beralih kepada realitas politik Indonesia kontemporer. Yang menjadi *burning issues* dalam kaitannya dengan masalah politik identitas sejak 11 tahun terakhir ialah munculnya gerakan-gerakan radikal atau setengah radikal yang berbaju Islam di Indonesia. Sebagaimana partner mereka di bagian dunia lain, gerakan-gerakan ini juga anti-demokrasi dan anti-pluralisme, dan sampai batas-batas yang jauh juga anti-nasionalisme. Secara ideologis, mereka ini jelas mendapat inspirasi dan pengaruh dari gerakan Islamis dan Salafi yang semula berpusat di beberapa negara-negara Arab, kemudian dengan kecepatan tinggi menyebar ke seluruh jagat. Untungnya di Indonesia, sebagian besar masjid masih di bawah pengawalan Muhammadiyah dan NU, sekalipun ada beberapa yang terinfiltrasi oleh virus ideologi serba radikal itu.

Sekalipun gerakan Islamis dan Salafi ini terdiri dari berbagai faksi di Indonesia, dalam satu hal mereka punya tuntutan yang sama: pelaksanaan Syari'ah Islam dalam kehidupan bernegara. Faksi-faksi yang ingin kita bicarakan di sini ialah MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), FPI (Fron Pembela Islam), dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Sedangkan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang sesungguhnya adalah partai Islamis yang sangat dipengaruhi oleh cita-cita al-Ikhwân al-Muslimûn (Persaudaraan Muslim), bentukan Hassan al-Banna tahun 1928 di Mesir, menempuh jalan demokrasi untuk mencapai tujuannya. Apakah cara-cara demokrasi itu sebagai taktik PKS sebelum menjadi kekuatan politik besar atau memang telah menerima demokrasi sebagai sebuah sistem politik, belum dapat dikatakan se-

karang. Kita akan kembali lagi ke PKS ini pada bagian akhir makalah ini. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa semua gerakan Islam yang sedang kita sorot ini telah menjadikan Islam sebagai politik identitas mereka. Bedanya adalah MMI, FPI, dan HTI, tidak menyebut diri sebagai gerakan politik, sekalipun melakukan fungsi politik, sedangkan PKS jelas-jelas sebuah partai politik dan sekaligus partai dakwah.

Kita bicarakan sekadarnya tentang MMI, FPI, dan HTI. Sebenarnya literatur sudah tersedia yang membahas faksi-faksi Islam radikal ini.[30] Seperti sudah dikatakan, semua faksi ini bersikeras untuk pelaksanaan Syari'ah dalam kehidupan bernegara. MMI misalnya sangat menyesalkan tersingkirnya Piagam Jakarta, khususnya pencoretan tujuh kata dari sila pertama Pancasila[31] yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" pada 18 Agustus 1945 atas prakarsa Hatta. Bagi MMI, penolakan arus besar umat Islam Indonesia terhadap pelaksanaan Syari'ah secara konstitusional dengan sendirinya dapat masuk dalam kategori "kafir, fasiq, dan zalim."[32]

---

[30]Karya yang paling komprehensif tentang gerakan radikal ini ditulis oleh Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Jakarta: PSAP, 2007), tebal 624 halaman plus daftar pustaka dan indeks. Ada lagi Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002); S. Yunanto et. al., *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara* (Jakarta: Teraju, 2003); Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Pada tingkat global, gerakan Salafi ini pun bervariasi, ada yang dipengaruhi Ikhwan, terutama oleh pemikiran Sayyid Quthb (Mesir) dan Abul A'la al-Maududi (Pakistan), dan ada pula yang bercorak Wahabi Saudi. Menurut Tibi, Saudi lebih berbahaya dari Iran, karena negara ini punya cukup dana untuk membiayai jaringan-jaringan untuk sebuah Islamisme dunia. (Lih. Tibi, *op.cit.,* hal. 96).

[31]Haedar Nashir, *op.cit.,* hal. 398.

[32] *Ibid.,* hal. 400, dikutip dari Irfan S. Awwas, *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'at Islam* (Jogjakarta: Wihdah Press, 2001), hal. 154. Kalimat aslinya berbunyi: "Melaksanakan Syari'at Islam dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara, bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat atau bangsa dari ancaman hukuman kafir, fasiq, dan dzalim."

Berikutnya, kita lihat FPI yang didirikan 17 Agustus 1998 di Pesantern Al-Umm, Ciputat, Tangerang, diprakarsai oleh beberapa habib dan kiyai.[33] Tentang latar belakang kelahirannya, dikatakan bahwa umat Islam telah lama menjadi korban penindasan, seperti yang berlaku di Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Haur Koneng, dan Sampang, tetapi tidak terungkap dan tidak mendapat keadilan.[34] Tetapi ada sebuah ironi di sini. Tersiar berita bahwa ada oknum tentara hadir dalam pertemuan itu, bahkan memberikan bantuan dana dan latihan militer.[35] Apa artinya ini? Tidak lain: oknum militer sedang main api yang dapat membakar Indonesia untuk jangka panjang, sekiranya kelompok-kelompok radikal ini dibiarkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama, seperti yang dilakukan atas gereja, Ahmadiyah, dan lain-lain, sementara aparat tidak mencegah perbuatan kriminal mereka. Bagi FPI, segala tindakan kekerasan itu dinilai sebagai bagian dari prinsip *nahi munkar* (mencegah kemungkaran). Yang biadab adalah bahwa tindakan kekerasan itu dilakukan dengan cara-cara yang *munkar* oleh aparat swasta.

Kemudian kita lihat selintas HTI. Berbeda dengan MMI dan FPI yang bercorak lokal Indonesia, HTI adalah gerakan politik transnasional yang pertama kali digagas antara lain oleh Taqiyuddin al-Nabhani, sempalan dari Ikhwan. Tujuan akhir perjuangan politik mereka adalah terciptanya sebuah kekhilafahan yang meliputi seluruh dunia Islam di bawah satu payung politik. Bagi HTI, khilafah adalah satu-satunya sistem politik yang sejalan dengan kehendak Syari'ah. Salah seorang tokoh HTI, M. Shiddiq al-Jawi, dalam sebuah diskusi buku di PADMA (Padepokan Musa Asy'arie, Yogyakarta) beberapa waktu yang lalu, dengan nada optimis mengatakan bahwa kekhilafahan yang dibayangkan itu akan berdiri tahun 2020.[36] Tidak

---

[33]Lihat Jamhari dan Jahroni, *op.cit.,* hal. 129-130.

[34]*Ibid.,* hal. 131-132.

[35]*Ibid.,* hal. 130.

[36]Diskusi buku saya berlangsung pada tanggal 9 Agustus 2009. Shiddiq menghadiahi saya sebuah kumpulan artikel oleh Arief B. Iskandar (ed.), *Ilusi*

dijelaskan bagaimana semuanya itu akan terjadi. Tokoh HTI yang lain, Farid Wadjdi, ketika menyoroti demokrasi dengan prinsip kedaulatan rakyatnya, tegas-tegas mengatakan bahwa demokrasi itu sistem kufur: "Sistem itu [demokrasi] bahkan bertentangan 100 persen dengan sistem Islam. Sistem ini tidak lain merupakan sistem kufur."[37] Menurut HTI, kekhilafahan juga sebagai realisasi negara Syari'ah.[38] Oleh sebab itu formalisasi Syari'ah harus dilakukan oleh negara. Sedangkan dalam sebuah negara-bangsa, seperti Indonesia, cita-cita ke arah realisasi Syari'ah menjadi tidak mungkin. Dalam perspektif ini, bagi HTI, konsep-negara bangsa itu "tidak lain hasil rekayasa penjajah yang kafir."[39]

Kesimpulan kita tentang HTI: sekalipun diembeli dengan perkataan Indonesia, organisasi ini jelas bercorak transnasional, di mana bangunan negara-negara bangsa harus dilebur. Bukankah angan-angan semacam ini tidak lain dari sebuah utopia mereka yang berusaha lari dari kenyataan? Tetapi kritik HTI terhadap praktik demokrasi di berbagai tempat, bukan substansinya yang menempatkan setiap warga pada posisi yang setara dalam sebuah negara, mengandung beberapa unsur kebenaran. Pertanyaan saya adalah: mengapa HTI menutup mata terhadap praktik busuk "kekhilafahan" yang dipaksakan dalam berbagai periode sejarah Muslim? Bukankah sistem khilafah selama berabad-abad telah membunuh prinsip egalitarian yang diakui dalam demokrasi, yang begitu tegas dinyatakan dalam al-Qur'an?[40] Pandangan yang a-historis semacam inilah

---

Negara Demokrasi (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), tebal 417 halaman dengan catatan kaki tanpa indeks. Buku ini di samping mengeritik keras sistem demokrasi, juga mengkampanyekan khilafah sebagai satu-satunya sistem politik masa depan umat Islam di muka bumi.

[37]*Ibid.,* hal. 317.

[38]*Ibid.,* hal. 333-340 menurut artikel yang ditulis oleh DR. H. U. Maman Kh., dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

[39]*Ibid.,* hal. 346, menurut artikel M. Shiddiq Al-Jawi.

[40]Lihat misalnya surat al-Hujurât: 13.

yang mengkhawatirkan saya: bahwa HTI berangan-angan menciptakan sebuah "imperialisme agama" pada skala global, yang menurut Shiddiq al-Jawi akan menjadi kenyataan pada tahun 2020, tinggal 11 tahun lagi dari sekarang.

Kelompok-kelompok radikal ini, dengan kemungkinan perbedaan dan bahkan konflik di antara berbagai faksi di kalangan mereka, menurut Yusuf al-Qardhawi termasuk dalam kategori mazhab Zhahiriyyah baru dengan enam ciri yang menonjol: pemahaman dan penafsiran yang literal, keras, dan menyulitkan, sombong terhadap pendapat mereka, tidak menerima perbedaan pendapat, mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan mereka, dan tidak peduli terhadap fitnah.[41] Kita turunkan salah satu ciri saja, yaitu mudah mengkafirkan orang yang berbeda pendapat. Al-Qardhawi menulis:

> Orang-orang literal tersebut tidak cukup hanya dengan mengingkari orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka, tetapi melakukan hal-hal lebih besar dari itu, yaitu dengan berburuk sangka, membid'ahkan, memfasikkan, dan sampai mengkafirkan mereka.
>
> Dasar bagi orang yang berbeda pendapat dengan mereka adalah "tuduhan." Padahal, menurut hukum manusia, dasar orang yang dituduh adalah, "benar" (tidak bersalah). Inilah hal yang ditegaskan oleh Syari'ah Islam. Namun dasar bagi mereka adalah, tertuduh (bersalah) hingga terbukti kebenarannya. Dan kebenarannya ada di tangan mereka, bukan di tangan orang lain.
>
> Untuk membantah para pemikir Muslim yang tidak sepakat dengan mereka, mereka telah menulis banyak buku besar dan dicetak dengan cetakan luks. Mereka meluaskan bantahan tersebut dengan membid'ahkan, memfasikkan (fasik takwil), dan bahkan mengkafirkan. Di antara pemikir-pemikir tersebut adalah; Syaikh Muhammad Al-Ghazali, Dr. Muhammad Imarah, Fahmi Huwaidi, dan saya sendiri.[42]

---

[41]Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Maqasid Syari'ah: Moderasi Islam antara Aliran Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal. 49-55.

[42]*Ibid.*, hal. 54.

Jika sikap mudah mengkafirkan orang-orang yang berlainan pendirian ini menyebar, maka sudah bisa dibayangkan bahwa yang akan terjadi adalah makin buyarnya suasana persaudaraan Muslim yang memang sudah lama rusak. Dengan kata lain, "Mereka memonopoli kebenaran, sebuah keangkuhan teologis yang muaranya satu: menghancurkan peradaban dengan memakai lensa kacamata kuda!"[43]

Akhirnya untuk menutup bagian ini, kita kembali kepada PKS. Dalam dokumen resmi partai disebutkan bahwa PKS tidak menolak demokrasi, pluralisme, dan nasionalisme Indonesia. Bahkan, menurut dokumen itu, dengan berpedoman kepada Piagam Madinah, PKS menerima kenyataan pluralitas agama dalam masyarakat Indonesia. Lalu untuk meredam pengaruh gerakan radikalisme Islam, umat Islam perlu memiliki gerakan Islam politik dalam sistem demokrasi.[44] Tentu yang dimaksud dengan gerakan Islam di sini adalah PKS sendiri. Sekalipun belum ada kupasan yang agak mendalam tentang pluralisme dan nasionalisme, PKS secara tertulis menerima kedua prinsip itu.

Persoalannya kemudian adalah: apakah penerimaan ini sebagai siasat politik sementara atau memang PKS telah menyesuaikan perjuangannya dengan realitas sosiologis masyarakat Indonesia? Jawabannya tidak mungkin diberikan sekarang; kita masih harus menunggu sampai suatu ketika sekiranya PKS pegang kekuasaan dan telah membesar. Bila partai ini konsisten dengan apa yang dikatakan dalam dokumen resminya, maka corak Islamis yang menjadi ciri utama gerakan Ikhwan di negara-negara Arab dan di negara-negara lain telah mengalami perubahan orientasi mendasar di tangan PKS.

Yang dimaksud dengan corak Islamis ialah suatu cita-cita politik untuk melaksanakan Syari'at Islam dalam sistem kenegaraan dengan

---

[43]Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, opcit.*, hal. 189.

[44]Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Platform Kebijakan Pembangunan, Falsafah Dasar Perjuangan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga*. (Jakarta: Majelis Pertimbangan Pusat PKS, 2008), hal. 74-75.

mencantumkannya dalam konstitusi sebuah negara. Dengan kata lain, terciptanya sebuah negara Islam atau negara berdasarkan Islam, sebagaimana yang dulu pernah diperjuangkan oleh kekuatan politik Islam dalam Majelis Konstituante (1956-1959) di Indonesia. Posisi PKS belum terlalu jelas, apakah sudah menerima Pancasila sebagai sesuatu yang sudah final atau masih berfikir untuk alternatif yang lain.

Bagian ini akan kita akhiri dengan sebuah gambaran singkat mengenai gagasan CN (Nurcholish Madjid) tentang masa depan Indonesia dengan Pancasilanya. Tidak mudah bagi saya untuk memetakan pemikiran CN tentang kaitan keislaman dan keindonesiaan karena memang belum ada karya khusus untuk itu yang telah ditulisnya. Tetapi dari artikelnya yang bertebaran di sana-sini, kemudian sudah dikumpulkan dalam format buku, kita bisa membaca benang merah gagasan CN tentang isu yang dimaksud.[45] Berbeda dengan generasi tokoh-tokoh partai Islam sampai dengan tahun 1960-an yang masih mempersoalkan Pancasila sebagai dasar filosofi negara, CN dan generasinya tidak lagi mau menghabiskan energi untuk membicarakan masalah ini. Dengan kata lain, Pancasila sudah diterima sebagai dasar filosofi negara dengan penuh kesadaran. Tugas selanjutnya adalah menerjemahkan nilai-nilai luhur Pancasila itu ke dalam kenyataan kehidupan yang kongkret, sesuatu yang masih jauh dari harapan kita semua. Dalam kalimat CN: "...nilai-nilai luhur bangsa kita dirumuskan dalam konstitusi, yakni Pancasila... yang menjadi sumber legitimasi dan kriteria terakhir keabsahan suatu kekuasaan di negeri kita."[46]

---

[45]Di antara karya Nurcholish Madjid itu dapat kita sebut di sini: *Islam, Kerakyatan, dan Keindonesiaan: Pikiran-Pikiran Nurcholish "Muda"* (Bandung: Mizan, 1993); *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992); *Pintu-Pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1994); dan *Islam, Kemoderenan, dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 2008).

[46]*Islam, Kemoderernan*, hal. 13.

Artinya, sebuah bangunan kekuasaan di luar Pancasila, menurut CN, menjadi tidak sah. Tetapi harus diingat bahwa Pancasila tidak boleh terpasung oleh kekakuan penafsiran. Pancasila harus menjadi "ideologi terbuka... dan tidak mungkin dibuatkan penjabarannya sekali untuk selama-lamanya."[47] Saya rasa, bukan saja Pancasila yang harus membuka diri bagi penafsiran baru: agama pun, yang diyakini berasal dari Allah, harus membuka diri untuk ditafsir ulang. Penafsiran ulang inilah sebenarnya hakikat dari kerja ijtihad, demi menjawab masalah-masalah zaman yang terus berubah.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus menghindari diri dari penafsiran monolitik. "... [D]iperlukan sikap yang lebih proaktif," tulis CN, "terhadap nilai-nilai Pancasila itu, yaitu usaha mengetahui dan menghayati apa sebenarnya yang dikehendaki oleh nilai-nilai luhur itu, dengan keberanian mengadakan 'pengusutan' kepada keadaan sekarang."[48] Jika boleh saya simpulkan, bagi CN, cita-cita keislaman dan cita-cita keindonesiaan bertemu dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka yang harus ditafsirkan secara "proaktif." Dengan semangat Sumpah Pemuda dan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dimensi negatif politik identitas yang bermuatan agama, etnisitas, dan ideologi, akan dapat dikawal dan diarahkan, demi memperkokoh semangat integrasi nasional, sesuatu yang mutlak bagi masa depan Indonesia sebagai bangsa dan negara.

Kebesaran CN terutama terletak pada keberaniannya yang luar biasa untuk "menyimpang" dari para pendahulunya dalam menyikapi Pancasila sebagai dasar filosofi negara. Bagi CN, umat Islam tidak perlu lagi berangan-angan untuk mengganti Pancasila dengan dasar lain. Gebrakan CN ini telah mengundang sikap pro-kontra yang cukup tajam di kalangan aktivis Muslim. Pendirian CN yang dinilai kontroversial itu telah merambat ke masalah-masalah lain, seperti

---

[47]*Ibid.,,* hal. 15.
[48]*Ibid.,* hal. 17.

sekularisasi, *Fiqh Lintas Agama*, tuduhan semua agama sama, dan banyak yang lain.

Yang cukup menyedihkan adalah peristiwa tanggal 26 Juli 2005, pukul 16.30-17.30, saat sekelompok orang mendatangi dan meneror CN dalam keadaan sakit. Saat ditanyakan tentang isu bahwa semua agama sama, CN menjawab: "Saya tidak berpendapat semua agama sama." Kemudian hal itu disusul lagi dengan pertanyaan bagaimana pendapat CN tentang perkawinan antaragama. Dalam kondisi sakit itu, CN menjawab: "Saya tidak dalam kondisi untuk menjawab."[49]

Yang saya gagal pahami adalah mengapa kelompok garis keras yang menjadikan Islam sebagai politik identitas itu tidak punya adab dalam "menginterogasi" seseorang yang sedang sakit dengan cara-cara kasar. Sekiranya CN dalam kondisi normal, sudah pasti semua pertanyaan itu akan dengan mudah ditanggapinya. CN bukanlah tipe intelektual Indonesia yang biasa mengeluarkan pendapat tanpa dasar yang kuat, namun pembela filosofi garis keras tidak mau tahu dengan itu semua. Seperti kita semua maklum, bulan berikutnya, 29 Agustus 2005, CN meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya. Warisan intelektual tokoh yang kita peringati ini akan berusia panjang, sekalipun semasa hidupnya tidak sempat menulis karya utuh tentang bagaimana semestinya pertalian Islam dengan keindonesiaan itu. Untuk meneruskan gagasan besar CN, maka adalah tugas kita yang masih hidup untuk mengembangkannya lebih jauh secara kritikal dan jujur.

Akhirnya

Politik identitas dalam bentuk apa pun tidak akan membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini di masa depan, selama cita-cita para pendiri bangsa tentang persatuan dan integrasi nasional, semangat Sumpah Pemuda yang telah melebur sentimen kesukuan, dan Pancasila sebagai dasar filosofi negara tidak dibiarkan tergantung di

[49]Lihat Resonansi saya "Cak Nur," *Republika*, 30 Agustus 2005, hal. 12.

awang-awang, tetapi dihayati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kesungguhan dan tanggung jawab inilah yang sering benar dipermainkan oleh orang yang larut dalam pragmatisme politik yang tuna-moral dan tuna-visi. Sikap semacam inilah yang menjadi musuh terbesar bagi Indonesia, dulu, sekarang, dan di masa datang.

Dengan ungkapan terakhir ini, maka tugas saya sebagai pembicara dalam Nurcholish Madjid Memorial Lecture dengan segala kelemahannya telah saya lakukan.***